



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/325/Itda/2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2024
Kepada:
Yth. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. 800.1.11.1/019/Itda/2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.

Predikat	Interpretasi
Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,40
Kategori			BB

Nilai 71,40 dengan kategori BB dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

1) Kualitas Perencanaan Kinerja

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan. Penjenjangan kinerja dari level pimpinan sampai dengan level individu telah seluruhnya mengacu pada diagram cascading.

2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran Kinerja

- a). SOP yang dibuat telah menggambarkan tata cara pengukuran data kinerja
- b). Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menggunakan media berbasis elektronik.
- c). Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

1) Kualitas Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan sudah spesifik.

2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang

dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja

1) Kualitas Evaluasi

- a) Evaluasi kinerja triwulanan sudah dilakukan dan telah sesuai dengan standar terbukti dengan telah didokumentasikannya hasil evaluasi serta evaluasi telah dilakukan secara berjenjang.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)

2) Pemanfaatan Evaluasi

- a). Hasil evaluasi kinerja program sudah sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- b). Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah sepenuhnya ditindaklanjuti

5. Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng agar:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Agar mempertahankan setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan. Penjenjangan kinerja dari level pimpinan sampai dengan level individu telah seluruhnya mengacu pada diagram cascading.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) SOP Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja disesuaikan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

maupun fungsional.

- 3) Pengukuran kinerja dapat sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Mempertahankan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan, pengukuran sampai dengan pelaporan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Agar tetap mempertahankan evaluasi kinerja triwulanan yang sesuai dengan standar dan terbukti dengan telah didokumentasikannya hasil evaluasi yang dilakukan secara berjenjang.
- 2) Menggunakan media berbasis elektronik dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip